

## Dinas TPH Sumut Salurkan Bantuan Alat Pertanian



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

**MEDAN, Waspada.co.id** – Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Sumatera Utara (Sumut) mendistribusikan paket bantuan alat pertanian kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Dikatakan, dari 32 wilayah yang menerima bantuan, tersalurkan masih 13 kabupaten, dan telah diserahkan kepada masing-masing dinas terkait.

Demikian disebutkan, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Jonni Hakim Purba kepada *Waspada Online*, Senin (7/12).

“Bantuan telah diterima Kabupaten Karo, Kota Tebingtinggi, Pematangsiantar, Tanjungbalai, Deliserdang, Sergej, Dairi dan Tapanuli Tengah. Sebelumnya, kita sudah distribusikan ke Batu Bara, Asahan, Palas, Paluta, dan Padangsidimpuan,” sebutnya.

Lebih lanjut hakim mengungkapkan, sejumlah tim masih bergerak menuju daerah untuk mendistribusikan bantuan tersebut, ditargetkan akan selesai pada minggu ke dua Desember.

“Untuk Taput, Samosir, Humbahas, dan Kepulauan Nias, akan disalurkan habis pilkada,” sebutnya.

Adapun jenis bantuan yang disalurkan berupa, *handsprayer*, parang, garu, likat kuning, perangkat lalat buah, cangkul, dan sorong (angkong).

### Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/>, Dinas TPH Sumut Salurkan Bantuan Alat Pertanian, tanggal 7 Desember 2020.
2. <https://www.beritasatu.com/>, Dinas TPH Sumut Distribusikan Bantuan Alat Pertanian ke Kabupaten dan Kota, tanggal 7 Desember 2020.

**Catatan:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 1 Angka 1 dan 8

1. *Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.*
8. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

Pasal 28 ayat (3) s.d. (5)

*(3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :*

- a. *perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;*
- b. *keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja.*
- c. *Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.*

*(4) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.*

*(5) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.*

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Pasal 1 ayat (3) s.d. (5)

- (1) Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:
- a. penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan atau
  - b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.
- (4) Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.
- (5) Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk:
- a. menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;
    2. sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan
    3. penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap.
  - b. melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (mandatory spending) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
  - c. melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan / atau antarprogram;
  - d. melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran untuk membiayai

*pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa;*

*e. menggunakan anggaran yang bersumber dari:*

- 1. Sisa Anggaran Lebih (SAL);*
- 2. dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan;*
- 3. dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu;*
- 4. dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau*

*f. dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);*

*g. menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan/atau investor ritel;*

*h. menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri;*

*i. memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan;*

*j. melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;*

*k. memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah; dan/atau*

*l. melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.*

*(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.*

**Pasal 3 ayat (1)**

*Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah

## Pasal 1

*Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:*

1. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.*
2. *Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merumpun pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.*
3. *Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
4. *Kepala Daerah adalah gubernur dan bupati/wali kota.*
5. *Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.*

## Pasal 2

- (1) *Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.*
- (2) *Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.*

## Pasal 4 ayat (1) s.d. (3)

- (1) *Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.*
- (2) *Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.*
- (3) *Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:*
  - a. *dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau*
  - b. *memanfaatkan uang kas yang tersedia.*